

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(L P P D)
AKHIR MASA JABATAN 2013-2018**

**PEMERINTAH DESA GOSARI
KECAMATAN UJUNGPAANGKAH
KABUPATEN GRESIK**



Disampaikan kepada Yth:
BAPAK BUPATI GRESIK

Kata Pengantar

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala Desa :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditetapkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa periode tahun 2013 - 2018 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan**, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Apabila didalam pembahasan terhadap **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan** ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Badan Permusyawaratan Desa demi kelangsungan kemajuan desa.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Gosari, 25 Desember 2018

Kepala Desa Gosari



MUHAMMAD ULINNUHA, SE.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa adalah,

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Peraturan Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Desa

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana dari APBN
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

B. GAMBARAN UMUM DESA.

A. Sejarah Nama Desa Gosari

Sejarah Desa Gosari tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Ujungpangkah di Kabupaten Gresik. Desa ini awalnya bernama desa Nggosari, yang dikandung maksud tempatnya sari atau juga dimaksud tempat mencari berkah cukup idial bagi masyarakat, dengan dikepalai seorang bangsawan, yang kemudian disebut Lurah. Lurah Mukamat Saikun adalah Kepala Desa yang pertama juga dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Ujungpangkah.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi Gosari. Nama Gosari didasarkan pada banyaknya sumber air bening yang ada di desa ini.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Mukamat Saikun (sejak terbentuk desa s.d 1959), sebagai Lurah
2. Mukayat (tahun 1959.s.d 1991), sebagai Kepala Desa
3. Nursyamsi (tahun 1991 s.d 2001), sebagai Kepala Desa
4. Drs. Mahfud (tahun 2001 s.d 2004), sebagai Pejabat sementara
5. Moh. Soleh,S.Ag. (tahun 2004 s.d 2009), sebagai Kepala Desa
6. Drs. Mahfud (tahun 2009 s.d 2010), sebagai Pejabat sementara
7. Moh. Ghufroon (tahun 2010 s.d 2014), sebagai Pejabat sementara
8. M. Ulinnuha,S.E. (tahun 2013 s.d sekarang), sebagai Kepala Desa

B. KONDISI GEOGRAFIS.

Desa Gosari adalah salah satu Desa dari 13 (Tiga belas Desa) Desa yang ada di Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik. Secara geografis Desa Gosari terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Gresik tahun 2004, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Gosari rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2014.

Secara administratif, Desa Gosari terletak di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyuurip dan Canga'an Kecamatan Ujungpangkah,
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wotan Kecamatan Panceng.
- Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah,
- Di sisi timur berbatasan dengan Desa KebonAgung Kecamatan Ujungpangkah.

Jarak tempuh Desa Gosari ke ibu kota kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 47 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Gosari adalah terdiri dari 813 KK, dengan jumlah total 2.573 jiwa, dengan rincian 1.253 laki-laki dan 1.320 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 4 ;

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	48 orang	54 orang	102 orang	4 %
2	5-9	65 orang	69 orang	134 orang	5,2 %
3	10-14	100 orang	103 orang	203 orang	8 %
4	15-19	73 orang	80 orang	153 orang	6%
5	20-24	95 orang	99 orang	194 orang	7,5 %
6	25-29	109 orang	112 orang	221 orang	8,5 %
7	30-34	106 orang	109 orang	215 orang	8,3 %
8	35-39	108 orang	111 orang	219 orang	8,5 %
9	40-44	91 orang	97 orang	188 orang	7,3 %
10	45-49	97 orang	102 orang	199 orang	7,7 %
11	50-54	92 orang	105 orang	197 orang	7,6 %
12	55-58	89 orang	103 orang	192 orang	7,4%
13	>59	180 orang	176 orang	356 orang	14 %
Jumlah Total		1.253 orang	1.320 orang	2.573 orang	100,0 0%

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Gosari sekitar 1.236 orang atau hampir 47,8 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tabel 5
Jumlah KK menurut Indikator / Kriteria

NO	KRITERIA KELUARGA	JML KK	Prosentase
1	Keluarga Pra Sejahtera	59	7,2 %
2	Keluarga Sejahtera Tahap I	45	5,6 %
3	Keluarga Sejahtera Tahap II	247	30,4 %

4	Keluarga Sejahtera Tahap III	359	44,1 %
5	Keluarga Sejahtera Tahap III Plus	103	12,7 %
Jumlah		813	100 %

Tingkat kemiskinan di Desa Gosari termasuk sangat rendah. Dari jumlah 813 KK di atas, sejumlah 59 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 45 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 247 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 359 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 103 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 12,8 % KK Desa Gosari adalah keluarga miskin.

2.1.2.1 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Gosari dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Usia Pra-Sekolah	135	5,2 %
3	Belum Tamat SD	180	7 %
4	Tamat Sekolah SD	239	9,3 %
5	Tamat Sekolah SMP	181	7 %
6	Tamat Sekolah SMA	849	33 %
7	Tamat Diploma	484	19 %
8	S1	493	19,1 %
9	S2	6	0,2%
10	S3	6	0,2%
Jumlah Total		2.573	100 %

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gosari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) sampai di tingkat Pendidikan Lanjutan Atas. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

2.1.3 Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Gosari, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Gosari pada tahun 2014. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Gosari seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2013 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Gosari.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Gosari mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Gosari mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat

baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Gosari kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Gosari. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Gosari. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Gosari. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Gosari. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

E. KONDISI EKONOMI

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Gosari Rp. 3.000.000,- / per bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gosari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,

jasa/perdagangan, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 714 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 128 orang, yang bekerja di sektor pertambangan 411 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 154 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.407 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 7
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Org)	Prosentase
1	Pertanian	514	46,5 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	13	1,2 %
	2. Jasa Perdagangan	30	2,8 %
	3. Jasa Angkutan	3	0,2 %
	4. Jasa Ketrampilan	4	0,3 %
	5. Jasa lainnya	78	7 %
3	Sektor pertambangan	311	28 %
4	Sektor lain	154	14 %
	Jumlah	1.107	100 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Gosari masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia yang belum bekerja berjumlah 129 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.236 orang (usia produktif). Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Gosari.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA

Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sejak Kepala Desa terpilih dengan masa bhakti tahun 2013 s/d 2018 dan telah dilantik Bupati Gresik pada tanggal 12 Desember Tahun 2014 nomor SK. 141/730/HK/437.12/2014 dan Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Desa pada tanggal 12 Desember Tahun 2014 nomor SK. 141/730/HK/437.12/2014. Secara bersama – sama BPD, Tokoh Masyarakat dan Elemen Masyarakat Lainnya merumuskan Visi Kepala Desa yakni:

Proses penyusunan RPJM Desa Gosari sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Gosari ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Gosari maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Gosari Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Gosari merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Gosari disebut juga sebagai Visi Desa Gosari.

Walaupun visi Desa Gosari secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Gosari melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Gosari semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2014-2018. Dalam momentum inilah visi Desa Gosari yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud

merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Gosari, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Gosari sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Desa yang Agamis, Toleransi,
Demokratis, Cerdas, Trampil, Berbudaya dan Bedaya Saing”**

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Gosari. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Gosari dalam segala sesuatu didasari dengan nilai-nilai Agama, bertoleransi sesama warga dan bertetangga, bermasyarakat yang demokratis dengan didasari pikiran yang cerdas, trampil serta mempunyai budaya budaya yang bisa berdaya saing, untuk kemakmuran bersama.

4.2. Misi

Hakekat Misi Desa Gosari merupakan turunan dari Visi Desa Gosari. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Gosari merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Gosari.

Untuk meraih Visi Desa Gosari seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Gosari sebagai berikut:

1. *Memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga Desa Gosari tanpa memandang agama, status sosial, golongan maupun jenis kelamin.*
2. *Membangun budaya masyarakat yang toleransi dan gotong royong.*
3. *Meningkatkan sistem pelayanan yang prima kepada masyarakat.*

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa.
5. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi potensi lokal.
6. Melestarikan seni budaya yang ada dalam masyarakat.
7. Pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan.
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, alami dan lestari.
9. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak, melalui pemberdayaan
- 10 Program pokok PKK.
10. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial.
11. Pemberdayaan Karang Taruna sebagai wadah resmi generasi muda harus terlahir kembali, dengan demikian pemuda di desa kita nanti ada wadah untuk beraktualisasi, bersosialisasi dan tentunya yang berprestasi.

Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi dalam segala sektor potensi yang ada untuk menuju daya saing dengan lainnya.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat
Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :
 1. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.

2. Penyediaan air bersih bagi semua warga, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
 3. Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga.
 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
 5. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu.
- b. Mengoptimalkan potensi pertanian
1. Memanfaatkan lahan tidur yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan Perhutani.
 2. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan melestarikan penghijauan.
 3. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
 4. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.
 5. Mengupayakan alat-alat modern untuk pertanian.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro
1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat RT/RW dan desa, terutama kelompok PKK
 2. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal/investor, pasar dan sumber bahan baku.
 3. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.
 4. Membimbing dan mengarahkan usaha pertambangan yang idial serta aman dan produktif.

4.2.2. Potensi dan Masalah

Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, wawancara, dan observasi perwilayah-wilayah atau RW. Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa Gosari. Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Desa Gosari memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Potensi yang dapat digali melalui proses partisipatif dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Alam

1. Lahan pertanian (sawah) yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
2. Lahan pertanian kering yang subur, belum dikelola secara maksimal
3. Adanya lahan penambangan batu dolumite yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan
4. Wilayah Desa Gosari sangat baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing, dan ternak lain, mengingat banyaknya pakan untuk jenis ternak tersebut, sedangkan bidang usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
5. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi, kambing dan ayam, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik.
6. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup dari hasil pengelolaan tanah pertanian bersama masyarakat.
7. Adanya sumber air pancuran yang belum bisa optimal penggunaan melalui irigasi pertanian dan sumber air mineral

8. Adanya usaha perikanan air tawar lahan waduk sebagai sampingan penyimpanan air untuk persawahan.
9. Adanya usaha meubelir dan perbengkelan.

b. Sumber Daya Manusia

1. Silks dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
2. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat merupakan kondisi yang idial untuk terjadinya pembangunan desa.
3. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
4. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
7. Masih adanya swadaya masyarakat (urunan untuk pembangunan).
8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidsn desa, dan para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.
10. Adanya penduduk yang mampu membuat bata putih untuk bahan bangunan.
11. Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan.

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Gosari yang menghadirkan masing-masing perwakilan desa yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara

dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang tidak tertampung.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

4.2.3. Program Pembangunan Desa

Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama lima tahun bagi Desa Gosari. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari masyarakat yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah dokumen yang sangat penting merupakan inti dari RPJM Desa Gosari.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa Gosari.

1.2.4.Strategi Pencapaian

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Gosari sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana prasarana, politik sosial budaya ,ekonomi dan kebencanaan,

memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintahan pusat, daerah maupun desa, seperti PNPM, APBN, APBD, ADD, SKPD, Swadaya, Kerjasama dengan swasta, dll.

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, PNPM dan SKPD ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD dan kerjasama dengan swasta.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LKMD dan perangkatnya, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Mesjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi.
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas).
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak.
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Memantau bersama oleh masyarakat dan BPD.
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

Strategi pencapaian target pembangunan yang meliputi waktu pelaksanaan, sumber dana, sasaran, penanggungjawab dan bentuk evaluasi pertanggungjawaban, dijelaskan secara detail pada tabel lampiran.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Desa, serta pembinaan masyarakat Desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan hasil musyawarah dari tingkat RT dan ditampung pada kegiatan dusun yang kemudian dibawa dalam Musrenbangdes.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Desa Gosari tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 90 % baik pembangunan yang bersumber dari APBDes, ADD, Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Retrebusi Daerah Kabupaten/Kota, APBD Proivinsi dan didukung partisipasi serta gotong-royong masyarakat Desa baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa , BPD, LKMD, Kadus dan RT, LINMAS, PKK berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah.

4. Jumlah Pegawai dan datanya

Desa Gosari dibagi menjadi 7 wilayah RW yang terdiri dari 16 RT, berikut data Perangkat Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ;

Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintah Desa Gosari

N o	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ulinnuha,SE.	Kepala Desa
2	Miftahul Munir, S.Pd.	Sekretaris Desa
3	Nanik Maulidah	Kepala Urusan Keuangan
4	Nur Rosyidah	Kepala Urusan Umum
5	Desy Nafilah Ayuningtiyas	Kepala Urusan perencanaan
5	Imam Saiful Huda	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib
6	Robbiq Siswanto	Kepala Seksi Kesra
7	M. Ghufron	Kepala Seksi Pelayanan

5. Data Lembaga Desa

Tabel 2.A

B. Nama Badan Permusyawaratan Desa Gosari sebelum perubahan

No	Nama	Jabatan
1	Bonaim	Ketua
2	Yani Hartanto	Wakil Ketua
3	Achmad Roziq	Sekretaris
4	Edi Lukito	Anggota
5	Afif Setiabudi	Anggota
6	Mohammad Faiz	Anggota
7	Miftahul Munir	Anggota

Tabel 2.B**Nama Badan Permusyawaratan Desa Gosari sesudah perubahan**

No	Nama	Jabatan
1	Bonaim	Ketua
2	Yani Hartanto	Wakil Ketua
3	Achmad Roziq	Sekretaris
4	Edi Lukito	Anggota
5	Afif Setiabudi	Anggota
6	Mohammad Faiz	Anggota

Tabel 3**Nama-nama LKMD Desa Gosari**

No	Nama	Jabatan
1	H. Munawar	Ketua
2	Sunakin	Wakil Ketua
3	Sudalil	Sekretaris
4	Mat Muhari	Bendahara
5	Zainul Ibad	Seksi Keamanan
6	H. Ahmad Syaikh	Seksi Pendidikan
7	Abdul Kholil	Seksi Lingkungan Hidup
8	Nur Kuwan	Seksi Pembangunan & Koprasi
9	Aslimah	Seksi Kesehatan
10	Dirjan	Seksi Pemuda dan Olah Raga
11	Siti Nurhidayati	Seksi PKK

Tabel 4**Pengurus Karangtaruna Desa Gosari**

No	Nama	Jabatan
1	Mujib Ridlwan	Ketua
2	Muhammad Miftakhul Khoir	Wakil Ketua
3	Nurul Widad	Sekretaris

4	Shofiyah Winayati	Wakil Sekretaris
5	Nur Izzatin	Bendahara
6	Ferry Shobakhussurur	Wakil Bendahara
7	Fahrur Rozi	Seksi Humas
8	Heru Sukamto	Anggota
9	Nailul Munaziyah	Anggota
10	Dirjan	Seksi Olah Raga
11	Widian Susilo	Anggota
12	Iqbal Maududi	Anggota
13	Sri Apriliyah	Seksi Pendidikan
14	Nafi'uddin	Anggota
15	Dariyati	Anggota
16	Afifuddin	Seksi Keagamaan
17	M. Ato' Murtadlo	Anggota
18	Saikul Farih	Anggota
19	Ahmad Mukafi	Seksi Kesejahteraan Sosial
20	Widatur Rahmi Illahi	Anggota
21	M. Anwaril Mubarak	Anggota
22	M. Toha Mahsun	Seksi Kelompok Usaha Bersama
23	Zainal Arifin	Anggota
24	Fitriyah Hanim	Anggota
25	Zaimul Ihsan	Seksi Lingkungan Hidup
26	Khotib	Anggota
27	Muhammad Na'im	Anggota

Tabel 5
Tim Penggerak PKK Desa Gosari

No	Nama	Jabatan
1	Siti Nur Hidayati	Ketua
2	Hj. Qoidatul Bariyah	Wakil Katua
3	Leny Yusfitasari	Sekretaris
4	Siti Sunarofah	Wakil Sekretaris
5	Nanik Maulidah	Bendahara
6	Nur Rosyidah	Wakil Bendahara
7	Ma'ulah Neneng Afwa Sulasiyah Tamamah Khuzaiyah Latifah	Ketua Pokja I Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
8	Mukhofifah Muhimmatus Sholihah Zunairoh Ummu Alifah Sukami Nur Lianah	Ketua Pokja II Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
9	Sumilah Umami Faridah Zulaehah Ulamah Nur Rosyidah Muflihah	Ketua Pokja III Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
10	Aslimah Isti'anah Safiatun Hj. Ma'munah	Ketua Pokja IV Sekretaris Anggota Anggota

	Hj. Zumaroh	Anggota
--	-------------	---------

Tabel 7.A
Data Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Desa Gosari sebelum Perubahan dan Pemekaran

NO	NAMA	JABATAN
1	Ahmad	Ketua RW 01
2	Arifin	Ketua RW 02
3	-	Ketua RW 03
4	Sapuan	Ketua RW 04
5	M. Thoha Mahsun	Ketua RW 05
6	Zaimul Ihsan	Ketua RW 06
7	Mundhori	Ketua RW 07
8	Mujib Ridlwan	Ketua RT 01 RW 01
9	Suwaji	Ketua RT 02 RW 01
10	Abdul Dhofir	Ketua RT 01 RW 02
11	Soman	Ketua RT 02 RW 02
12	Jumari	Ketua RT 03 RW 02
13	Muhlisin	Ketua RT 01 RW 03
14	Purwanto	Ketua RT 02 RW 03
15	Zainuddin	Ketua RT 01 RW 04
16	Azizi Khamid	Ketua RT 02 RW 04
17	Konandar	Ketua RT 01 RW 05
18	Najib Hadi	Ketua RT 02 RW 05
19	Zainul Mustazi	Ketua RT 01 RW 06
20	M. Sahlan	Ketua RT 02 RW 06
21	Nur Kholis	Ketua RT 01 RW 07
22	Mohammad Mufiq	Ketua RT 02 RW 07
23	Haryono	Ketua RT 03 RW 07

Tabel 7.B
Data Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Desa Gosari sesudah Perubahan dan Pemekaran

NO	NAMA	JABATAN
1	Ahmad	Ketua RW 01
2	Arifin	Ketua RW 02
3	-	Ketua RW 03
4	Sapuan	Ketua RW 04
5	M. Thoha Mahsun	Ketua RW 05
6	Zaimul Ihsan	Ketua RW 06
7	Mundhori	Ketua RW 07
8	Ropi'in	Ketua RT 01 RW 01
9	Suwaji	Ketua RT 02 RW 01
10	Sulisno	Ketua RT 01 RW 02
11	Aliman	Ketua RT 02 RW 02
12	Jumari	Ketua RT 03 RW 02
13	Haris Jefri	Ketua RT 01 RW 03
14	Purwanto	Ketua RT 02 RW 03
15	Zainuddin	Ketua RT 01 RW 04
16	Azizi Khamid	Ketua RT 02 RW 04
17	Konandar	Ketua RT 01 RW 05
18	H. Agus	Ketua RT 02 RW 05
19	Zainul Mustazi	Ketua RT 01 RW 06
20	Moh. Syaikh	Ketua RT 02 RW 06
21	Khoirul Amin	Ketua RT 03 RW 06
21	Nur Kholis	Ketua RT 01 RW 07
22	Mohammad Mufiq	Ketua RT 02 RW 07
23	Haryono	Ketua RT 03 RW 07

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Gosari kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes bisa sesuai rencana. Pada umumnya terjadi di PAD dan untuk ADD, Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten, tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Desa Gosari lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7. Kondisi sarana dan prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gosari, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala Desa. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gosari masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut ;

- Pemerintahan Desa lebih optimal dalam melayani warga masyarakat
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Desa
- Partisipasi swadaya masyarakat dan gotong-royong tenaga lebih optimal

Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Desa Gosari adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Unit	7	TPQ/TPA	2 Unit
2	Poskesdes	1 Unit	8	Masjid	2 Unit
3	Posyandu	7 Unit	9	Mushola	17 Unit
4	SMP/MTs	2 Unit	10	Kantor Linmas dan Bumdes	1 Unit
5	SD/MI	3 Unit	11	Pemakaman Umum	3 lokal
6	TK/Paud	2 Unit			

g. Permasalahan dan penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar dapat dukungan sekaligus partisipasi dari masyarakat kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Desa Gosari yang berjarak 6 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 20 menit ke Ibukota Kecamatan Ujungpangkah yang relatif dekat dan tidak menemui kendala dalam pelaporan-pelaporan data bisa tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Desa yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDes, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa sendiri.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Dari Tahun 2007 sampai Tahun 2013 pasal 8 huruf b urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten merupakan tugas desentralisasi yang dilaksanakan pemerintah desa meliputi berbagai bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan desa yang disesuaikan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat yaitu :

a. Bidang Pertanian Ketahanan Pangan

Pertanian ketahanan pangan merupakan sektor unggulan bagi percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat desa Gosari hal ini didukung dengan wilayah pertanian berupa lahan tegalan dan kebun yang luas.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas untuk mewujudkan ketahanan pangan yang terkait dengan sistem usaha tani antara lain :

1. penyediaan sarana dan prasarana hasil produksi untuk nilai tambah bagi peningkatan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian, kampanye dan penyediaan benih unggul.
3. Melakukan pembinaan pada kelompok tani bekerjasama dengan dinas pertanian.

b. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara. Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat ditentukan dengan parameter tingkat pendidikannya dan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan merupakan prioritas pembangunan dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai insan pembangunan pedesaan. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas pendidikan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan mutu pendidikan.
2. Memberikan bantuan bagi siswa miskin seperti pemberian bantuan alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kemudahan dalam memberikan surat keterangan untuk beasiswa siswa miskin.

c. Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat, dan dalam pelayanan kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk mewujudkan diluncurkan program Kartu Indonesia Sehat, program keluarga harapan (PKH), Posyandu Balita dan Lansia secara periodik, BPJS Kesehatan dan lain lain. Walaupun demikian gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat dihindari banyak penyakit yang menimpa masyarakat antara lain penyakit demam berdarah, muntaber dll. yang sangat perlu mendapat penanganan yang lebih serius dari pemerintah dan pemerintah desa.

Kegiatan kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti kelengkapan pelayanan POSBINDU dan Poskesdes Desa Gosari harus didukung dengan fasilitas yang cukup dan dengan tenaga yang cukup pula seperti tenaga bidan desa.
2. Peningkatan pelayanan masyarakat meliputi :
Pelayanan kesehatan balita, ibu pada posyandu di masing masing pos, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pemberian makanan pendamping bagi bayi kurang gizi , pengelolaan jamkesmas .
4. Mengupayakan dan memperjuangkan insentif kader posyandu.

d. Bidang Sosial

Masih adanya warga masyarakat desa yang tergolong miskin maka diadakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut seperti mengusulkan bantuan rumah keluarga miskin (GAKIN) ke dinas sosial/dinas PU, menyalurkan program beras miskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dukungan untuk paguyuban penggalang lahat, dan fasilitasi kartu Gresik Sehat (KGS).

e. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan desa urusan pekerjaan umum adalah satu urusan yang sangat penting (Vital) dan

strategis dalam mendukung dan menunjang peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan potensi desa yang dimiliki guna sepenuhnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa .

Dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum tersebut pemerintah desa telah melaksanakan program-program sebagai berikut .

Tahun 2013

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
2. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 002
3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT. 003 RW. 007
4. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 007

Tahun 2014

1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 007
2. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan RW 002

Tahun 2015

1. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Pemavingan RT 03 RW 07)
2. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemakaman (Pemadatan jalan makam)
3. Pembangunan Gapura Masuk Desa
4. Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Lingkungan Desa (Pembangunan Drainase RT 01 RW 07)
5. Pembangunan BUMDesa
6. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan) (Penanaman Bunga Hias dan Pohon Lindung)
7. Pembangunan Kantor Karang Taruna dan Linmas
8. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir

Tahun 2016

1. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan.

Sasaran kegiatan ini diperuntukkan :

- a. Pemavingan jalan lingkungan di Rt 01 Rw I

- b. Pemavingan jalan lingkungan di Rt 03 Rw VII
- c. Pemavingan jalan lingkungan di Rt 01 Rw VII
- d. Pemavingan jalan lingkungan di Rt 01 Rw V
- e. Pengerasan jalan lingkungan di Rt 01 Rw VII
- f. Pengerasan jalan lingkungan di Rt 02 Rw III
- g. Pengerasan jalan lingkungan di Rt 02 Rw I
- h. Pengerasan jalan lingkungan di Rt 02 Rw VI jl.makam
- i. Pemavingan jalan lingkungan di Rt 02 Rw VII
- 2. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Makam.

Sasaran pembangunan yang dilakukan adalah pemagaran makam utara.

- 3. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Sanitasi Lingkungan Desa.

Sasaran kegiatan pembangunan yang dilaksanakan :

- a. Pembangunan Drainase di Rt 01 Rw I
- b. Pembangunan sarana MCK di Pasar Desa.
- 4. Pembangunan / Rehabilitasi Ponkesdes / atau Polindes.

Sasaran kegiatan merehab Pokesdes Gosari.

- 5. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana BUM Desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan kantor / ruang kegiatan BUM Desa.
- 6. Penguatan Permodalan BUM Desa.
- 7. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa. Sasaran kegiatan yang dilaksanakan adalah penanaman bungah di kampung dan lomba penghijauan kampung.
- 8. Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Karang Taruna dan Linmas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan Kantor Karang Taruna dan Linmas di Rt 01 Rw VII.

Tahun 2017

- 1. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan.
Sasaran kegiatan yang dicapai adalah untuk meningkatkan kelancaran transportasi masyarakat di wilayah RT dengan rincian

sebagai berikut;

- a. Pemavingan jalan lingkungan di RT 03 RW II
- b. Pemavingan jalan lingkungan di RT 02 RW III
- c. Pemavingan jalan lingkungan di Slolok
2. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT). Sasaran kegiatan yang dicapai adalah untuk meningkatkan kelancaran transportasi masyarakat petani.
3. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Sanitasi Lingkungan Desa.

Sasaran kegiatan yang dicapai adalah untuk meningkatkan saluran air dan memenuhi kebutuhan air di desa dengan rincian berikut :

- a. Pembangunan Drainase di RT 01 RW VII
- b. Penyediaan Jasa Sumberdaya Air
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lumbung Desa. Sasaran kegiatan yang dicapai adalah Pembangunan Gudang Barang untuk menyediakan gudang untuk BUMDesa.
5. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa.
Sasaran kegiatan yang dicapai adalah penanaman bunga di kampung dan lomba penghijauan kampung.
6. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin.
Sasaran kegiatan yang dicapai adalah Rehabilitasi Rumah Ibu Karsih RT 01 RW 07 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.
7. Pembangunan TPT Embung Desa.
Sasaran kegiatan yang dicapai adalah menyediakan tempat penampungan air di Embung Desa.
8. Pemeliharaan Pasar Desa.
Sasaran kegiatan yang dicapai adalah menciptakan Pasar Desa yang bersih dari sampah.

Tahun 2018

1. Pemavingan Jalan Lingkungan (Karung) RT 002 RW 006
2. Pengerasan Jalan Lingkungan (TPA) RT 002 RW 003
3. Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT) RT 003 RW 007

4. Pembangunan Drainase Kebun Jati
5. Pembangunan Drainase (Karung) RT 002 RW 006
6. Pembangunan Drainase RT 002 RW 003
7. Pembangunan MCK Umum (Wagos) RT 002 RW 006
8. Pembangunan Papan Nama Desa
9. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
10. Pengembangan Wisata Desa dengan rincian berikut :
 - a. Kolam Wisata
 - b. Gazebo
 - c. Pintu Masuk Wisata
11. Pemeliharaan Sarana Prasarana Pos Kamling
12. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa

f. Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup tidak terlepas dari suatu upaya untuk pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan lingkungan hidup juga dapat dijadikan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan pada bidang lainnya agar terwujud pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lingkungan hidup juga berperan dalam mengembangkan sumber daya alam dan juga dalam menata desa agar tetap indah dan menarik, maka keseimbangan lingkungan hidup sudah sepatutnya dipertahankan dan dilestarikan.

Upaya dalam peningkatan lingkungan hidup yang lebih baik terprogram dalam program penghijauan lingkungan baik RT maupun desa. Upaya ini terprogram dalam rangkaian kegiatan Bulan Bakti dan Agustusan bahkan Desa Gosari beberapa kali memperoleh juara dalam lomba lingkungan tingkat Kabupaten Gresik. Hal yang mungkin perlu diperbaiki lagi adalah upaya konservasi lingkungan untuk keberadaan sumber daya air.

g. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

Dalam rangka ketertiban dan pelayanan dalam periode 2013-2018 terdapat pengisian formasi pengisian aparatur desa sebanyak 2 (dua) kali yang diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum pemerintah desa telah berupaya untuk bekerjasama dengan pihak terkait, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan atau pada masyarakat desa pada umumnya untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (low inforcement).

h. Bidang Otonomi Desa

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban seperti desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa telah mengadakan proses regulasi atau penyederhanaan peraturan-peraturan yang ada, melakukan penelitian dan pendataan potensi desa, melakukan kerjasama dengan Pihak ketiga, melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa.

i. Bidang Pertanahan

Kegiatan dalam bidang pertanahan antara lain : Memberikan pelayanan pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, pembuatan surat keterangan warisan, hibah juga dengan

1. Memberikan surat keterangan hak atas tanah
2. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah, dll.

j. Bidang kependudukan dan catatan sipil

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain :

1. Melakukan registrasi jumlah penduduk sesuai jenis kelamin dan mata pencaharian dilaksanakan oleh kepala desa melalui Kasi Pemerintahan secara periodik.
2. Melakukan registrasi jumlah penduduk menurut hak pilih dalam pemilihan Umum baik pilkada, Pileg maupun pilpres dan oleh PPS.
3. Menerbitkan surat keterangan kartu keluarga untuk penerbitan KTP

4. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk .
5. Membuat surat keterangan untuk penerbitan akte kelahiran .
6. Membuat Data Base Kependudukan.

k. Bidang Kesatuan Bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum.

Kondisi sosial masyarakat desa Gosari dari tahun 2013 s/d tahun 2018 secara umum masih relatif aman dan terkendali langkah langkah yang dilakukan antara lain :

- Melakukan kegiatan patroli aparat keamanan (polisi)
- Bersama Linmas tetap memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan desa
- Jadwal Ronda lingkungan yang dikoordianotri ketua RT masing-masing

l. Bidang perencanaan

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif dan akuntabel. hal ini akan dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan dilandasi prinsip-prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan desa. Penyusun perencanaan pembangunan desa baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan desa satu tahun disusun dan direncanakan secara bersama sama dengan melibatkan semua tokoh masyarakat (stake holder) melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) setiap tahun.

m. Bidang Penerangan, informasi dan komunikasi

Menyampaikan/mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya serta penegakan hukum , selain itu juga menyampaikan informasi jenis-jenis pembangunan yang masuk desa .

n. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peran perempuan tidak dapat dipisahkan dalam kesuksesan pembangunan, pemerintah desa menyadari hal tersebut dengan mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan seperti pada pelaksanaan musrenbangdes, musrenbang kecamatan dan unsur kegiatan yang melibatkan keterwakilan perempuan sesuai perundang-undangan yang berlaku. mensosialisasikan pentingnya kesehatan ibu dan balita sehingga mereka akan tetap memelihara kesehatannya dan dapat mencegah kematian yang sering menimpa ibu hamil dan bayinya, tambahan makan bergizi bagi anak, dll.

o. Bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Bekerjasama dengan puskesmas menyampaikan informasi dan pelayanan pada masyarakat tentang standar keluarga sejahtera, makanan sehat bagi balita, imunisasi dan gizi keluarga, program PKH, mensosialisasikan tindakan pencegahan kematian ibu hamil dan melahirkan serta kematian bayi

p. Bidang Pemuda dan olah raga

Pemuda dan olah raga satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda merupakan harapan bangsa, segala potensi dan kreatifitasnya perlu dipacu terus menerus agar,terbina generasi yang tangguh dan mandiri serta siap berprestasi baik di tingkat daerah , nasional maupun internasional. Dalam upaya memacu prestasi pemuda dan keolahragaan , maka pemerintah desa Gosari telah melaksanakan program sbb:

- Peningkatan peran serta kepemudaan dengan pembentukan karang taruna kemudian mengusahakan keterlibatannya dalam pembangunan desa.
- Pengadaan sarana dan prasarana olah raga .
- Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga .

- Menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan olah raga,
- Pelatihan teknis, dll.

q. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa

- Melakukan identifikasi sumber daya manusia
- Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan
- Penataan dan pemberdayaan organisasi masyarakat desa

r. Bidang statistik

Bidang statistik sangat penting dan berperan dalam memotret kegiatan kegiatan pembangunan melalui kumpulan angka-angka terhadap pembangunan desa. Secara umum urusan dan kegiatan statistik dilakukan kerjasama dengan badan pusat statistik kecamatan dan kabupaten Gresik. program yang dilaksanakan antara lain sensus pendataan penduduk, sensus pendataan ekonomi, dll.

s. Bidang arsip dan perpustakaan

Dokumen-dokumen penting desa adalah aset yang perlu diamankan, dilestarikan dan dipelihara secara utuh keberadaannya karena memuat sejarah perkembangan desa. Urusan kearsipan berperan penting dalam mengadministrasikan perkembangan desa setiap tahunnya. Guna menunjang tata kearsipan tersebut program-program yang dilaksanakan pemerintah desa adalah: program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan system pelaporan keuangan desa, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip desa.

Sementara dibidang perpustakaan belum diadakan mengingat masih rendahnya minat baca masyarakat akan tetapi untuk mengakses informasi di desa diadakan internet yang dapat diakses masyarakat.

2. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah kabupaten maupun Provinsi segenap jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaga-lembaga Desa senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana karena kendala teknis maupun non teknis.

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Gosari melaksanakan ketentuan yang ada serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan yang ada baik dari jajaran Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Ketua RW dan Ketua RT, PKK dan LINMAS serta didukung oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Data Perangkat Desa

N o	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ulinnuha,SE.	Kepala Desa
2	Miftahul Munir, S.Pd.	Sekretaris Desa
3	Nanik Maulidah	Kepala Urusan Keuangan
4	Nur Rosyidah	Kepala Urusan Umum
5	Desy Nafilah Ayuningtiyas	Kepala Urusan perencanaan
5	Imam Saiful Huda	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib
6	Robbiq Siswanto	Kepala Seksi Kesra
7	M. Ghufon	Kepala Seksi Pelayanan

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten, Provinsi maupun Pusat didata secara detail dan benar. APBDes menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik yang skala kecil yang tertuang dalam RPJMDes. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian

Bagi Pemerintah Desa Gosari terhadap semua masalah yang terjadi dan timbul merupakan suatu pembelajaran untuk menuju suatu kemajuan dan kedewasaan, pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang

tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya salah satunya adalah dengan bermusyawarah.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa , karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, karena pemerintah Desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan kabupaten, sedangkan dalam Desa pelaksanaannya mengacu pada peraturan Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya program dan kegiatan Desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan.

5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan Desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan Desa yang sah lainnya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDes maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana-dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah.

2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran Desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Gosari mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan Desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah anggaran

Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat Desa Gosari yang kemudian dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa . Kepala Desa selaku kepala Pemerintah di Desa Gosari adalah pemegang kekuasaan

1. The first step in the process of the development of a new product is the identification of a market need. This is often done through market research, which can be conducted in a number of ways. One way is to conduct a survey of potential customers, asking them what they would like to see in a new product. Another way is to look at the competition and see what they are offering. This can help you identify gaps in the market and areas where you can differentiate your product.

2. Once you have identified a market need, the next step is to develop a concept for the product. This involves creating a detailed description of the product, including its features, benefits, and target market. You should also consider the manufacturing process and the cost of production. This step is crucial because it helps you to understand the feasibility of the product and to make any necessary adjustments before moving forward.

3. The third step is to create a prototype of the product. This is a physical model of the product that you can use to test and refine your design. There are a number of ways to create a prototype, ranging from simple 3D printing to more complex methods like injection molding. The prototype should be as close to the final product as possible, so that you can accurately assess its performance and appearance.

4. Once you have a prototype, the next step is to conduct a series of tests to evaluate the product. This can include testing the product's performance, durability, and safety. You should also conduct a series of focus group discussions with potential customers to get their feedback on the product. This information is invaluable for making improvements and ensuring that the final product meets the needs of the market.

5. The final step in the process is to launch the product into the market. This involves creating a marketing plan that outlines how you will promote the product and reach your target audience. You should also consider the distribution channels and the pricing strategy. Once the product is launched, you should continue to monitor its performance and make any necessary adjustments to ensure its success.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Selama periode 2013-2018 masih belum terdapat kerjasama antar desa yang dilakukan karena memang belum ada program atau kegiatan yang mengarah ke kerjasama antar desa.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- a. PT. POLOWIJO
- b. PT. GOKHUSU

2. Dasar Hukum

- a. Kesepakatan Bersama PT Polowijo dengan nomor 204/PG-KTT/VII/2017 dan 545/ 01/ 437-116-08/2017
- b. Dengan PT Gokhusu berupa Corporate Social Responsibility (CSR)

3. Bidang Kerjasama

- a. Dengan PT polowijo berupa Pengelolaan tambang galian C (dolomit) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
- b. Dengan PT Gokhusu berupa Corporate Social Responsibility (CSR)

4. Nama Kegiatan

Kerjasama pengelolaan tambang dan CSR

5. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Pemerintah desa dengan PT terkait

6. Sumber dan jumlah anggaran

Dana bersumber dari PT terkait sesuai lampiran

7. Jangka Waktu Kerjasama

- a. dengan PT. Polowijo berlangsung 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan
- b. dengan PT Gokhusu berlangsung selama lokasi/jalur transportasi melewati wilayah Desa Gosari

8. Hasil Kerjasama

- a. Retase kompensasi sesuai kesepakatan dan CSR dari PT POLOWIJO sebesar Rp. 182.500.000,-/ tahun (mulai tahun 2013-2018)
- b. hasil kompensasi CSR dari PT. GOKHUSU Rp. 138.170.000,- (Periode 2017-2018)

9. Permasalahan dan penyelesaian

Permasalah relatif tidak ada walaupun ada diselesaikan secara kekeluargaan dan hukum antar kedua belah pihak.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa

Sengketa batas desa selama periode 2013-2018 relatif tidak ada konflik dengan desa tetangga walaupun ada dengan desa sekapuk di bagian selatan tapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

2. Penyelesaian yang dilakukan

Permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan

3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan

Kepala Desa dengan Kasi Pemerintahan dan Trantib

4. Data Pegawai

N o	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ulinnuha,SE.	Kepala Desa
2	Miftahul Munir, S.Pd.	Sekretaris Desa
3	Nanik Maulidah	Kepala Urusan Keuangan
4	Nur Rosyidah	Kepala Urusan Umum
5	Desy Nafilah Ayuningtiyas	Kepala Urusan perencanaan
5	Imam Saiful Huda	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib
6	Robbiq Siswanto	Kepala Seksi Kesra
7	M. Ghufon	Kepala Seksi Pelayanan

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

- Kekeringan = rawan
- Kebakaran lahan = siaga
- Longsor lahan tambang = siaga
- Banjir = rawan

3. Sumber dan jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Desa Gosari untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBDes, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Desa mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadaya masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Desa atau berdasarkan pertauran yang berlaku dapat dianggarkan dalam Musdes.

4. Antisipasi desa

Dalam mengantisipasi segala bnetuk bencana alam, Pemerintah Desa Gosari serta Lembaga-lembaga Desa bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan masing-masing seperti himbauan rawan kebakaran di musim kemarau.

Perbaikan drainase dan kontrol dilakukan terutama ketika memasuki musim penghujan. Serta himbauan pelarangan untuk

tidak menambang di wilayah langit-langit bukit kapur untuk menghindari longsor juga dilakukan.

5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa dan segenap lapisan warga masyarakat Desa Gosari seluruhnya.

6. Kelembagaan yang dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Desa Gosari belum terbentuk oleh sebab itu ke depan kiranya perlu dibentuk dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam.

7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan dapat terjadi di wilayah desa Gosari antara lain:

- Kekeringan
- Kebakaran lahan
- Longsor lahan tambang
- Banjir

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum di Desa Gosari telah diadakan kegiatan ronda pos malam disetiap lingkungan wilayah RT masing dan kebijakannya diserahkan ke RT terkait, diadakan patroli oleh pemerintah desa dan Linmas untuk waktu-waktu yang dianggap rawan seperti malam tahun baru, malam Idul Fitri maupun pertunjukan yang melibatkan karamaian. Gangguan pencurian serta penyakit masyarakat dilakukan tindakan pencegahan dengan memberikan sosialisasi serta edaran dan teguran pada masyarakat dan untuk penyelesaian kasus desa bertindak sebagai mediator maupun arbitrator.

Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Gosari dibantu oleh BABINKAMTINMAS/POLMAS Kepolisian Sektor Ujungpangkah dan BABINSA, Dan Ramil Kec. Ujungpangkah yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik berselisihan warga maupun kejadian lainnya.

Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilaporkan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan serta hukum adat/kebiasaan yang berlaku di desa Gosari.

Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Gosari selalu berkoordinasi dengan BABINSA, POLMAS dan BABINKAMTIBMAS.

Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDes sampai saat ini belum dianggarkan untuk anggaran khusus kamtibmas berupa patroli berkala dianggarkan untuk tahun 2019.

BAB VII

P E N U T U P

Kesimpulan

Secara umum sebagian besar program kegiatan dalam periode jabatan kepala desa Gosari tahun 2013-2018 telah terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar desa (jalan, drainase, penerangan, pendidikan dan yang lain), serta terlaksananya tata kelola pemerintahan desa secara lebih efektif dan efisien.

Meskipun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menghambat jalannya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun secara garis besar dengan kerjasama yang baik antar berbagai pihak program-program yang sudah termuat dalam PJMDes maupun yang bersifat insidental dapat terlaksana.

Ucapan Terima Kasih

Terselesaikannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gosari selama periode 2013-2018 merupakan hasil kerja keras dari masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat.

Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di periode 2013-2018 ini.

Saran dan Masukan

Pada akhirnya dengan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa Gosari di periode 2013-2018 ini terlihat bahwa hal yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut, antara lain:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan, pendampingan dan pembinaan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan masyarakat desa agar proses perencanaan hingga pelaksanaan setiap program-program kegiatan benar-benar

terlaksana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai yang diharapkan.

- 2) Perlu dilakukan upaya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta aktif mereka dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di desa.
- 3) Guna mewujudkan tingkat kemandirian desa yang lebih baik dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, perlu upaya-upaya riil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset-aset ekonomi desa termasuk potensi wisata dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Gosari, 25 Desember 2018
Kepala Desa Gosari


MUHAMMAD ULINNUHA, SE.